

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, 1990. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Erlangga.
- I Made Sandy, 1977, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria
- Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*.
- John Salendeh, 1997, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Made Sandy, 1977, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria
- Muhajir Darwin, 1992, *Hasil Loka karya, Analisa Kebijakan Sosial*, Yogyakarta, UGM
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta
- Mulyani, A; S. Rirung, dan I. Las. 2011. Potensi dan Ketersediaan Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian*.
- Nurmanaf, A.R, H. Mayrowani, dan E. Jamal. 2001. Evaluasi Sosial Ekonomi Multifungsi Lahan Sawah. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. ISBN 979-9474-06-X
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*.
- Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia

Sabiham, S .2008. Manajemen Sumberdaya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia

Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. *Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002. ISBN 979-9474-20-5

Suryana, A. 2005. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional*. Makalah dibawakan pada Seminar Sistem Pertanian berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan Nasional tanggal 15 Pebruari 2005 di Universitas Sebelas Maret Solo.

B. Internet

“200 Hektar Lahan Pertanian DIY Beralih Fungsi, dalam <http://www.konsumenproperti.com>, diakses 29 Maret 2015.

“Alih Fungsi Lahan Pertanian di DIY Jadi Perhatian KPK”, dalam <http://www.tribunjogjanews.com>, diakses 29 Maret 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

SE Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantultahun 2010-2030